

TESIS

**KETETAPAN PERSAMAAN TARIF OLEH PENGURUS
DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**



DEDY ALEXANDER LADO
NIM: 12224021

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

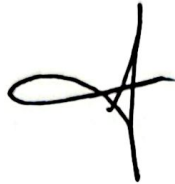
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 09 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. H. R. Ibnu Arly A, S.H., M.Kn.



Dr. Habib Adjie S.H., M.Hum

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISIDANGKAN

Pada tanggal 04 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. H.R. Ibnu Arly, S.H., M.Kn.



Dr. Habib Adjie S.H., M.Hum

TESIS

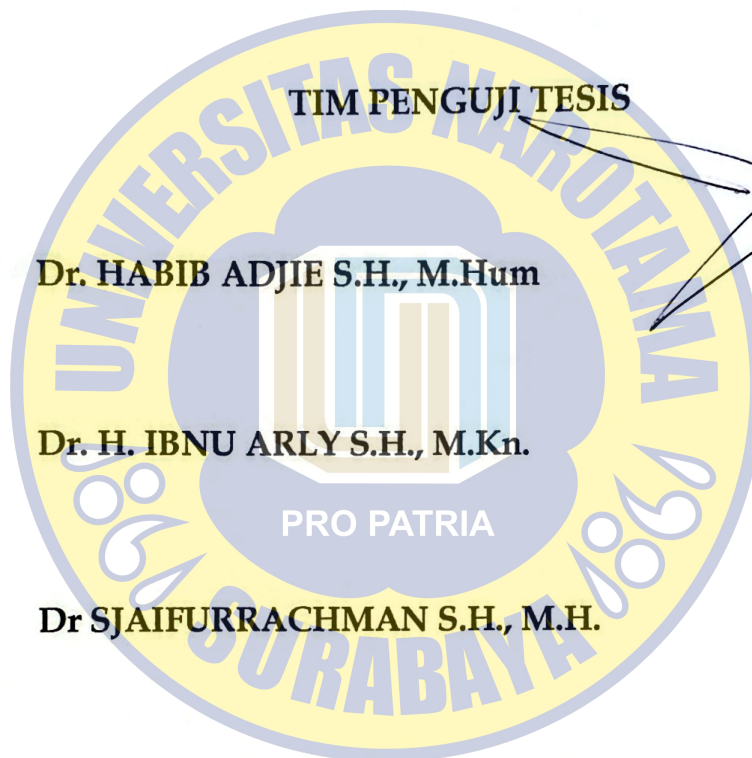
PADA TANGGAL : 4 FEBRUARI 2026

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

Anggota : Dr. H. IBNU ARLY S.H., M.Kn.

: Dr SJAIFURRACHMAN S.H., M.H.



.....
.....
.....

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Februari 2026

Yang membuat pernyataan

PRO PATRI



DEDY ALEXANDER LADO
NIM : 12224021

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul:

“Ketetapan Persamaan Tarif oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dalam Perspektif Keadilan.”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama.

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penetapan ketetapan persamaan tarif oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan perdebatan normatif dan etis dalam praktik kenotariatan. Ketetapan tersebut berada pada irisan antara kewenangan organisasi profesi, asas kebebasan berkontrak, serta nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif kesesuaian ketetapan persamaan tarif tersebut dalam perspektif hukum perdata dan keadilan Pancasila.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Narotama;
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama;
3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama;
4. Bapak Dr. H. R. Ibnu Arly, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan secara konsisten dan mendalam selama proses penyusunan tesis ini;
5. Seluruh dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama atas ilmu pengetahuan dan wawasan akademik yang telah diberikan kepada penulis;
6. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan semangat selama penulis menempuh pendidikan;

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran dan diskusi akademik selama masa studi.

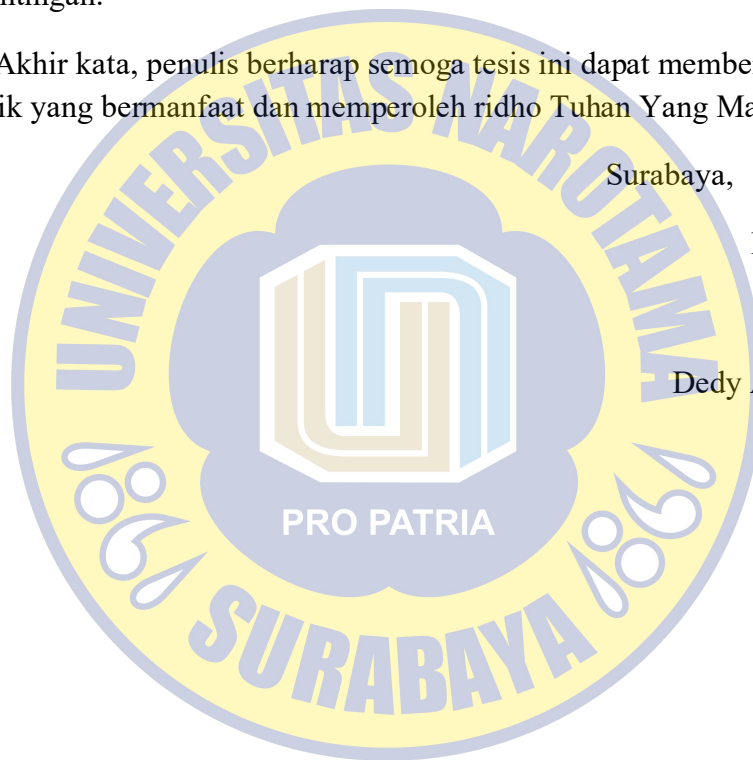
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, serta menjadi bahan pemikiran bagi praktisi dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi akademik yang bermanfaat dan memperoleh ridho Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, Februari 2026

Penulis

Dedy Alexander Lado



Abstrak

Ketetapan persamaan tarif oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) merupakan kebijakan internal organisasi profesi yang dimaksudkan untuk menjaga solidaritas profesi, mencegah persaingan tidak sehat, serta mempertahankan martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum. Namun, dalam praktiknya, ketetapan persamaan tarif tersebut menimbulkan perdebatan yuridis terkait kesesuaiannya dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata serta prinsip keadilan Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian ketetapan persamaan tarif oleh Pengda INI dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia dan prinsip keadilan Pancasila.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan organisasi profesi, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, filsafat hukum, dan kenotariatan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketetapan persamaan tarif oleh Pengda INI tidak memiliki kekuatan mengikat secara kontraktual karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan tersebut hanya berkedudukan sebagai pedoman etik organisasi profesi sehingga tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak diberlakukan secara memaksa. Ditinjau dari perspektif keadilan Pancasila, ketetapan persamaan tarif secara normatif mengandung tujuan keadilan sosial dan perlindungan martabat profesi, namun dalam tataran praktik belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena belum mengakomodasi perbedaan kondisi ekonomi wilayah, kemampuan masyarakat, serta posisi notaris baru.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar Pengda INI menyusun ketetapan tarif yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial, sehingga mampu menyeimbangkan kepentingan organisasi, kebebasan notaris, dan akses masyarakat terhadap pelayanan kenotariatan.

Kata Kunci: *Notaris, Ketetapan Persamaan Tarif, Asas Kebebasan Berkontrak, Keadilan Pancasila, Pengda INI.*

Abstract

The stipulation of uniform notarial fees issued by the Regional Board of the Indonesian Notary Association (Pengda INI) constitutes an internal policy of the professional organization aimed at maintaining professional solidarity, preventing unhealthy price competition, and preserving the dignity of the notarial office as a public official. However, in practice, such fee stipulation has raised juridical issues regarding its conformity with the principle of freedom of contract in Indonesian private law and the principle of Pancasila justice. This research aims to analyze the conformity of the uniform fee stipulation issued by Pengda INI with the principle of freedom of contract in Indonesian civil law and the principle of Pancasila justice.

This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and philosophical approaches. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations related to the notarial profession and professional organizations, as well as secondary legal materials in the form of books on law, legal philosophy, and notarial studies. The analysis is conducted qualitatively through systematic and conceptual interpretation.

The findings indicate that the uniform fee stipulation issued by Pengda INI does not have binding contractual force because it does not fulfill the legal requirements of a valid agreement as stipulated in the Indonesian Civil Code. Such stipulation only constitutes an ethical guideline within the professional organization and therefore does not violate the principle of freedom of contract as long as it is not enforced coercively. From the perspective of Pancasila justice, the uniform fee stipulation normatively reflects the objective of social justice and the protection of professional dignity; however, in practice, it has not fully realized substantive justice because it has not adequately accommodated differences in regional economic conditions, public financial capacity, and the position of newly appointed notaries.

Based on these findings, it is recommended that Pengda INI formulate a more flexible, participatory, and socially oriented fee stipulation in order to balance organizational interests, notarial freedom, and public access to notarial services.

Keywords: *Notary, Uniform Fee Stipulation, Freedom of Contract, Pancasila Justice, Pengda INI.*

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	iii
Abstract.....	iv
Daftar Isi.....	v
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4.Orisinalitas Penelitian.....	6
1.5.Tinjauan Pustaka.....	11
1.6.Metode Penelitian.....	21
1.7.Sistematika Penulisan.....	30
BAB II KETETAPAN PERSAMAAN TARIF OLEH PENGDA INI DALAM PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK	33
2.1.Kedudukan Notaris dan Fungsi Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dalam Pembinaan Profesi	34
2.2.Ketetapan Persamaan Tarif sebagai Instrumen Pembinaan Profesi	46
2.3.Analisis Normatif Kesesuaian Ketetapan Persamaan Tarif dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata.....	62
BAB III KETETAPAN PERSAMAAN TARIF OLEH PENGURUS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA	76
3.1Konsep Keadilan dalam Perspektif Pancasila.....	77
3.2.Keadilan Pancasila dalam Etika Profesi dan Organisasi Profesi Notaris.....	89
3.3.Penilaian Keadilan Pancasila terhadap Penentuan dan Penerapan Ketetapan Persamaan Tarif oleh Pengda INI.....	101
BAB IV PENUTUP	122
4.1.SIMPULAN.....	122
4.2.SARAN.....	123
Daftar Pustaka.....	126